

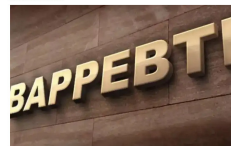


News Title : Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Ilegal Sepanjang 2023	
Media Name : Validnews.id	Journalist : Faisal Rachman
Publish Date : 01 February 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 0
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Ilegal Sepanjang 2023

Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelepasan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar

Situs: Faisal Rachman



Forum Adu Pelanggaran Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, 24 Januari

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan pemblokiran 1.855 situs web ilegal, di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2023. Itu, Kepala Bappebti Kasan mengatakan, pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelepasan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar. Untuk itu, masyarakat diminta agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Kasan melalui konferensi di Jakarta, Kamis (2/2).

Kasan menjelaskan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal. Ia berharap, masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan ke Bappebti melalui saluran media sosial atau datang langsung bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mempermudah upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukakan," kata Kasan.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Pemantauan Bappebti Aldison mengatakan, setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Entitas yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan permohonan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Situs web/PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut bersedia baik untuk meninjau permohonan ke Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembenahan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka melindungi klien-perusahaan usaha di bidang PBK yang sehat.

Maladministrasi Layanan Publik
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menamakan potensi maladministrasi pelayanan publik Bappebti dalam menangani laporan masyarakat yang menjadi korban perdagangan berjangka komoditas (PBK).

"Dari modus-modus PBK yang menyababkan kerugian masyarakat, kami berharap ada di dalam menyelesaikan persoalan hukum tadi jangan-jangan memang ada maladministrasi," kata Anggota Ombudsman RI Yaka Hestia Fidia dalam sesi wawancara Ombudsman RI berkapal "Tantangan dan Strategi Penguatan Hukum serta Aspek Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Berjangka Komoditi" yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Jumat (26/1).

Yaka menyebut bentuk maladministrasi yang ditemukan adanya dugaan pelanggaran kewajiban hukum dalam melaksanakan kewajiban penyediaan la menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan peran Bappebti sebagai lembaga yang power dalam membuat, memperbaharui, meninjau dan menetapkan hukum.

Amman Panel 08 ayat (1) dalam undang-undang terkait PBK disebutkan bahwa Pejabat Negara negara Sipil tertentu di lingkungan Bappebti, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PBK berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "hali mereka dilakukan penyidikan, tetapi tidak pernah digunakan," ucap Yaka.

Dari pemeriksaan Ombudsman RI kata Yaka, hasil laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI terkait PBK periode 2023-2024 sebanyak 29 laporan. Dari jumlah tersebut, 18 laporan dalam tahap pemeriksaan, 3 laporan dituntut, empat laporan tidak memiliki syarat, tiga laporan tahap monitoring dan satu laporan tahap verifikasi formal.

Kemudian, ada tujuh palang berjangka dari 15 palang yang dilaporkan bermasalah. Yaitu, PT MAJ, PT IH, PT RFL, PT GKH, PT EDW dan PT MEF & SAM. Dengan total kerugian material yang dialami pelapor Rp 68,5 miliar. "Ada dua palang berjangka yang dilaporkan tidak banyak. Palang ke Indonesia ada 15. Dari 15 itu, tujuh yang dilaporkan, sedangkan Bappebti bisa fokus di tujuh ini saja," ujar Yaka.

Selain itu, durasi penanganan laporan yang masuk ke Bappebti membutuhkan 600 hari. Tindak lanjut penanganan, dari 15 laporan yang diperiksa Ombudsman, sebanyak enam laporan ditemukan tidak administratif (60%), tiga laporan tahap pemeriksaan (20%), dan laporan tahap jadal penyelesaian, dua laporan tahap evaluasi, satu laporan tahap menunggu gelar kasus dan satu laporan lagi menunggu putusan kasasi.

"Tindak lanjut yang dilakukan Bappebti hanya sampai pada tahap pemberian sanksi administratif dan tidak pernah melakukan penyidikan," ungkap Yaka.

Pada hal, lanjut dia, harapan pelapor hanya dua, yakni Bappebti melakukan pemeriksaan dan penyidikan atau dengan tindak pidana perdagangan berjangka dan menggunakan sanksi perembukan atau atau kerugian material yang dialami.

Dugaan maladministrasi lainnya yang ditemukan, yakni pengabaian kewajiban hukum dalam melaksanakan kewenangan pengawasan preventif atau dugaan tindak pidana PBK, terkait dari banyaknya palang berjangka yang sama yang dilaporkan oleh para pelapor ke Ombudsman RI.

"Semua ini sebenarnya berlatut dalam layanan sistem pengadilan online atau daring yang akhirnya orang merasa lama, karena itulah, mengapa ke Ombudsman. Harapannya cepat terjawab masuk ke Ombudsman pun seperti masuk ke labang yang sama, lama pula penanganan," ujar Yaka.

Yaka berharap, ke depannya ini dapat menjadi mandan bagi Bappebti untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan tidak hanya menjabarkan modus maladministratif saja kepada palang berjangka yang dilaporkan. Karena diluar dari modus-modus palang berjangka kepada masyarakat, dengan mengungkap-ungkap keuntungannya yang fantastik dirampas, dipaksa secara tidak sadar, agar memandangkan perjanjian; mengelola atau membuat keputusan dengan cara diproses, yaitu delay dan effort by system (DBS).